

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Manajemen Laba, Sebelum dan Sesudah Pandemi

Calvin Wahyuda Pohan, Fidelia Ivana Hariono, Sandy Harianto

Sekolah Bisnis dan Ekonomi Universitas Prasetiya Mulya
 BSD City Kavling Edutown I.1, Jl. BSD Raya Utama, BSD City, Tangerang 15339, Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Keywords: <i>Political connections; Accrual earnings management; Real earnings management; COVID-19.</i> Kata Kunci: Koneksi Politik; Manajemen laba akrual; Manajemen laba riil.	<i>This study examines the influence of political connections on accrual-based earnings management (AEM) and real earnings management (REM) among publicly listed firms in Indonesia, both before and during the COVID-19 pandemic. Using a sample of 343 non-financial and non-utility firms over the period 2017–2022, the study employs an endogenous treatment effect regression (etregress) model with a full information maximum likelihood (FIML) approach to address potential endogeneity in the political connection variable. The findings reveal that prior to the pandemic, political connections had no significant effect on either accrual or real earnings management. However, during the pandemic period, political connections were found to significantly increase both accrual and real earnings. These results suggest that the role of political connections is context-dependent: less important in stable conditions but important during times of crisis. This study contributes to the literature on corporate governance in emerging markets and provides practical implications for regulators and stakeholders concerned with the financial reporting quality of politically connected firms.</i>
Corresponding author: Sandy Harianto Email: sandy.harianto@prasetiyamulya.ac.id Copyright © 2026 by Authors, Published by PARADEIGMA. This is an open access article under the CC BY-SA License	SARI PATI Penelitian ini mengkaji pengaruh koneksi politik terhadap praktik manajemen laba berbasis akrual dan riil pada perusahaan publik di Indonesia, baik sebelum maupun selama pandemi COVID-19. Dengan menggunakan sampel sebanyak 343 perusahaan non-keuangan dan non-utilitas selama periode 2017–2022, Penelitian ini mengadopsi regresi data panel menggunakan model endogenous treatment effect regression (etregress) dengan pendekatan full information maximum likelihood (FIML) untuk mengatasi potensi endogenitas pada variabel koneksi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum pandemi, koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba, baik akrual maupun riil. Namun, selama masa pandemi, koneksi politik secara signifikan meningkatkan praktik manajemen laba akrual dan riil. Temuan ini menegaskan bahwa peran koneksi politik bersifat kontekstual: tidak terlihat pengaruhnya dalam kondisi stabil, namun menjadi penting ketika menghadapi situasi krisis. Studi ini memberikan kontribusi terhadap literatur tata kelola perusahaan di negara berkembang serta menyampaikan implikasi praktis bagi regulator dan pemangku kepentingan terkait kualitas pelaporan keuangan pada perusahaan yang memiliki hubungan politik.

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh koneksi politik terhadap manajemen laba, baik dalam bentuk akrual maupun riil. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi perbedaan efek koneksi politik terhadap manajemen laba dalam dua periode yang berbeda, yaitu sebelum pandemi COVID-19 (2017–2019) dan selama pandemi COVID-19 (2020–2022). Pembagian ini didasarkan pada pernyataan resmi dari World Health Organization (WHO) yang menyatakan bahwa pandemi COVID-19 dimulai pada 11 Maret 2020 dan berakhir pada 5 Mei 2023.

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perekonomian global mengalami penurunan terdalam sejak Perang Dunia Kedua dan dianggap sebagai krisis kesehatan global terbesar pada abad ini (Naseer et al., 2023; World Bank, 2020). Pandemi yang mulai merebak pada akhir tahun 2019 tersebut merupakan kondisi abnormal dan tidak terduga yang menimbulkan dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan bisnis (Kementerian Keuangan, 2020).

Topik yang dipilih menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut dikarenakan fenomena ini memiliki implikasi yang luas terhadap transparansi dan kualitas laporan keuangan perusahaan. Koneksi politik merupakan salah satu fenomena yang hadir di seluruh negara, Faccio (2006) menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik ditemukan di 47 negara dengan karakteristik ekonomi yang beragam, menunjukkan bahwa fenomena ini tidak terbatas pada negara berkembang maupun negara maju, sehingga menjadikannya sebagai fenomena global yang tidak dapat dihindari dalam berbagai sistem ekonomi (Li et al, 2022).

Definisi koneksi politik dalam penelitian ini merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Faccio (2006) serta disesuaikan dengan konteks Indonesia dimana suatu perusahaan dikategorikan memiliki koneksi politik apabila terdapat anggota dewan atau pemegang saham yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan setidaknya 10% hak kepemilikan merupakan mantan anggota parlemen, menteri, atau individu dengan jabatan tinggi lainnya, termasuk mantan jenderal kepolisian dan militer (Khalil et al., 2022). Keberadaan koneksi politik ini memberikan kepercayaan diri lebih bagi para manajer, mengingat perusahaan dengan keterkaitan politik yang kuat memiliki akses terhadap informasi eksekutif yang lebih luas dan berpotensi memperoleh keuntungan ekonomi tertentu. Dalam praktiknya, perusahaan dengan hubungan politik cenderung mengelola laba guna mencapai target keuntungan yang telah ditetapkan, sehingga kinerja keuangan mereka tampak lebih baik di mata pemangku kepentingan (Hashmi, 2018).

Manajemen laba dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu manajemen laba berbasis akrual dan manajemen laba berbasis aktivitas riil. Manajemen laba berbasis akrual mengacu pada strategi perusahaan dalam memodifikasi laporan keuangan melalui perubahan metode atau estimasi akuntansi yang berlaku (Zang, 2012). Sementara itu, manajemen laba berbasis riil merupakan suatu bentuk penyimpangan dari praktik operasional agar mencerminkan laporan keuangan yang wajar dan sesuai dengan praktik operasional normal (Roychowdhury, 2006).

Untuk menguji hubungan tersebut, penelitian ini menganalisis perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal tersebut dilandaskan pada keunikan tata kelola yang unik di Indonesia. Tata kelola perusahaan di Indonesia menggabungkan elemen-elemen dari *market-based system* dan *relationship-based system*. *Market-based system* di Indonesia ditandai dengan adanya dewan direksi dua tingkat (*two-tier board*) dan hak-hak pemegang saham minoritas yang relatif lebih lemah. Di sisi lain, *relation-based system* juga memiliki ciri-ciri serupa, seperti hak-hak pemegang saham yang lebih rendah (Khalil et al., 2022). Selain itu, penelitian yang menguji pengaruh koneksi politik terhadap manajemen laba masih memberikan hasil yang tidak konsisten.

Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian sebelumnya mengenai koneksi politik dan manajemen laba menunjukkan hasil yang beragam. Khalil et al. (2022) menemukan bahwa koneksi politik dapat menurunkan praktik manajemen laba akrual maupun riil. Namun, temuan berbeda ditunjukkan oleh Ahmed et al. (2022) dan Hamdi (2024), yang menyatakan bahwa koneksi politik justru meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Di sisi lain, penelitian oleh Harymawan dan Nowland (2016) menyoroti bahwa pengaruh koneksi politik terhadap kualitas laba sangat bergantung pada stabilitas dan efektivitas politik di suatu negara. Ketidakkonsistenan hasil ini mendorong perlunya pengujian ulang dalam konteks dan periode yang berbeda, khususnya dengan mempertimbangkan krisis seperti pandemi COVID-19

Principal-Principal Agency Theory

Terdapat dua tipe *agency theory*. *Agency Theory Type I*, atau dikenal sebagai *traditional type I agency problem* (Purkayastha et al., 2022), menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan pengelola perusahaan (*agent*). Dalam hubungan ini, pemilik menyerahkan pengelolaan aset kepada agen, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Namun, teori ini kurang sesuai diterapkan di negara berkembang karena sebagian besar bisnisnya didominasi oleh kepemilikan keluarga atau konsentrasi kepemilikan yang tinggi, sehingga permasalahan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas menjadi lebih signifikan.

Dalam penelitian ini digunakan *Agency Theory Type II*, karena lebih relevan dengan karakteristik perusahaan di Indonesia. Studi Claessens et al. (2000) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat konsentrasi kepemilikan yang tinggi, di mana sebagian besar saham perusahaan publik dikuasai oleh pemegang saham pengendali. Kondisi ini meningkatkan potensi konflik antara pemilik mayoritas dan pemilik minoritas.

Lebih lanjut, Ball et al. (2003) menyatakan bahwa perekonomian di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, didominasi oleh perusahaan keluarga dari berbagai skala, baik privat maupun publik. Hal ini diperkuat oleh laporan PwC yang menyatakan bahwa sekitar 95% perusahaan di Indonesia merupakan perusahaan keluarga. Oleh karena itu, penggunaan *Agency Theory Type II* dinilai paling tepat untuk menjelaskan struktur pengambilan keputusan dan potensi konflik kepemilikan yang menjadi dasar dalam penelitian ini.

Dalam konteks koneksi politik, keberadaan koneksi politik sebagai pemegang saham utama semakin memperkuat posisi pemilik mayoritas, khususnya ketika mereka punya akses terhadap aktor-aktor penting di pemerintahan. Koneksi politik bisa dimanfaatkan untuk memperbesar pengaruh dan memuluskan agenda pribadi, sering kali dengan mengorbankan hak dan kepentingan pemilik minoritas. Supatmi (2022) juga menggunakan pendekatan *principal–principal agency theory* dalam meneliti hubungan antara koneksi politik dan kinerja perusahaan di Indonesia. Dengan melihat konteks struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dan kuatnya peran koneksi politik di Indonesia, teori ini dianggap paling sesuai untuk menjelaskan dinamika yang sedang diteliti.

Pengembangan Hipotesis

Terdapat temuan bahwa perusahaan dengan koneksi politik mendapatkan akses istimewa terhadap pendanaan eksternal, yang memungkinkan perusahaan bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit (Joni et al., 2019). Lebih lanjut, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan yang dipimpin oleh eksekutif dengan koneksi politik cenderung memperoleh keuntungan ekonomi tertentu, seperti akses yang lebih mudah terhadap pinjaman bank (Liu et al., 2013), pengaruh terhadap penetapan biaya audit (Gul, 2006), serta peluang yang lebih besar dalam memperoleh pendanaan pemerintah (Duchin & Sosyura, 2012).

Beberapa penelitian telah memberikan pandangan terkait hubungan koneksi politik terhadap manajemen laba. Hal ini menandakan bahwa praktik manajemen laba merupakan isu krusial, mengingat perusahaan memiliki insentif untuk menyesuaikan laporan keuangan guna mencapai target tertentu dan mempertahankan daya tarik di mata pemangku kepentingan. Manajemen laba sering kali menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas serta transparansi informasi keuangan yang disajikan. Secara konseptual, praktik ini dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk manipulasi yang bertujuan mempengaruhi persepsi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Akibatnya, penyimpangan dalam laporan keuangan dapat berdampak negatif terhadap keakuratan informasi yang tersedia bagi para pemangku kepentingan dan investor, sehingga mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat berdasarkan laporan tersebut (Healy & Wahlen, 1999).

Meskipun telah dilakukan banyak penelitian terkait topik ini, kesimpulan yang didapatkan masih tidak konklusif dan berbeda-beda. Harymawan dan Nowland (2016) menjelaskan bahwa perusahaan dengan koneksi politik akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas laba mereka dalam kondisi politik yang stabil. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa stabilitas dan efektivitas politik memiliki hubungan yang berlawanan, di mana meningkatnya efektivitas politik menyebabkan manfaat dari koneksi politik menjadi kurang signifikan. Selain itu, stabilitas politik yang baik mengurangi aktivitas perusahaan terhadap tekanan pasar, sehingga kebutuhan untuk melakukan manajemen laba menjadi lebih rendah sehingga kualitas laba yang dihasilkan cenderung lebih baik.

Dalam konteks Indonesia, studi Khalil et al. (2022) menemukan bahwa koneksi politik berkontribusi dalam penurunan aktivitas manajemen laba di tingkat perusahaan. Lebih lanjut, pengaruh koneksi politik dalam menekan

praktik manajemen laba semakin diperkuat jika perusahaan menggunakan auditor berkualitas dalam proses pemeriksaan laporan keuangan dan jika memiliki tata kelola perusahaan yang baik di tingkat manajemen.

Namun, temuan berbeda dikemukakan oleh Hamdi (2024) dalam penelitiannya terhadap perusahaan-perusahaan di Prancis. Hasil studinya memberikan bukti bahwa perusahaan dengan koneksi politik justru menunjukkan kualitas laba yang lebih rendah. Keberadaan direktur independen dengan koneksi politik dapat mendorong manajer untuk bertindak oportunistik guna memperoleh keuntungan pribadi, sehingga praktik manajemen laba menjadi lebih agresif. Sejalan dengan hal tersebut, Hashmi (2018) menyatakan bahwa koneksi politik dapat meningkatkan agresivitas praktik manajemen laba untuk memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Lisboa dan Kacharava (2018) menunjukkan bahwa praktik manajemen laba cenderung meningkat dalam kondisi krisis. Dalam situasi tersebut, perusahaan dengan koneksi politik lebih rentan terhadap praktik manajemen laba yang bersifat oportunistik, terutama untuk mempertahankan citra keuangan yang stabil di tengah ketidakpastian ekonomi. Hal ini semakin menguatkan argumen bahwa dampak koneksi politik terhadap manajemen laba dapat sangat bergantung pada konteks politik dan ekonomi yang melingkupinya.

Dengan mempertimbangkan berbagai temuan ini, hipotesis bahwa

H1.a: Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap manajemen laba riil dan H1.b: Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap manajemen laba akrual. Serta H2.a: Koneksi politik memiliki pengaruh positif terhadap praktik manajemen laba riil di periode COVID-19, namun negatif di situasi normal dan H2.b: Koneksi politik memiliki pengaruh positif terhadap praktik manajemen laba akrual di periode COVID-19, namun negatif di situasi normal menjadi wajar untuk ditelusuri.

Temuan-temuan pada penelitian sebelumnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba pada perusahaan juga perlu diperhatikan. Pertama, ukuran perusahaan (size) kerap diasosiasikan dengan tingkat keterbukaan informasi. Perusahaan dengan ukuran besar umumnya menjadi sorotan publik dan memiliki insentif untuk menjaga reputasi melalui penyajian laporan keuangan yang kredibel. Kondisi ini menekan ruang gerak manajemen dalam melakukan manipulasi atas laporan keuangan. Oleh karena itu, perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki kecenderungan lebih rendah dalam melakukan manajemen laba (Siregar & Utama, 2008). Kedua, leverage atau tingkat utang perusahaan menjadi faktor penting yang dapat memicu praktik manajemen laba. Ketika struktur utang tinggi, perusahaan menghadapi kerentanan terhadap konflik kepentingan antara pemegang saham dan kreditur (Ho et al., 2016).

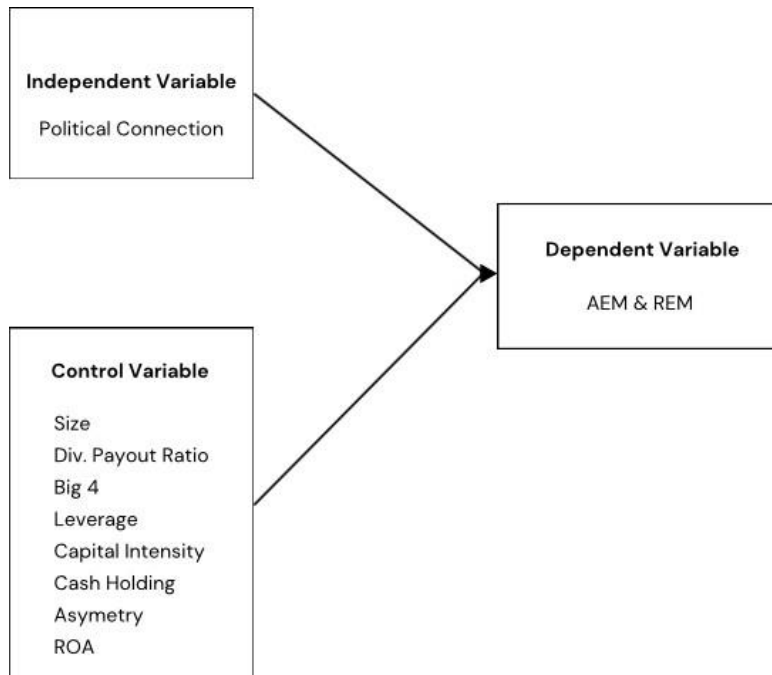
Disisi lain, kualitas audit berperan dalam menekan kemungkinan terjadinya manipulasi laporan keuangan. Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four dikenal memiliki reputasi dan standar audit yang tinggi sehingga mampu memberikan pengawasan yang lebih efektif terhadap penyusunan laporan keuangan. Kehadiran auditor berkualitas tinggi dapat membatasi peluang manajemen untuk melakukan praktik manipulatif (Francis & Wang, 2008). Selanjutnya, capital intensity mencerminkan seberapa besar ketergantungan perusahaan terhadap aset tetap. Aset tetap yang besar bersifat relatif tidak fleksibel dan sulit dimanipulasi melalui akuntansi, sehingga perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi memiliki fleksibilitas lebih rendah dalam melakukan praktik manajemen laba. Dengan demikian, perusahaan dengan capital intensity yang tinggi cenderung memiliki kecenderungan manajemen laba yang lebih rendah (Perotti & Wagenhofer, 2014).

Keputusan perusahaan terkait dengan pembagian dividen juga perlu diperhatikan dalam hal ini. Perusahaan yang secara konsisten membagikan dividen mengirimkan sinyal positif kepada investor atas komitmen mereka. Oleh karena itu, perusahaan dengan dividend payout ratio yang tinggi memiliki kecenderungan lebih rendah untuk melakukan manajemen laba (He et al., 2017). Terakhir, mengikuti Khalil et al. (2022), variabel cash holding dan asymmetry diikutsertakan dikarenakan perusahaan dengan kas yang besar dan asimetri informasi yang tinggi dapat mengarah kepada rendahnya kualitas laba di perusahaan tersebut dan peningkatan dalam aktivitas manajemen laba.

Kerangka pemikiran

Kerangka penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian. **Gambar 1** mengilustrasikan bagaimana koneksi politik sebagai variabel independen diasumsikan memengaruhi praktik manajemen laba, baik akrual (AEM) maupun riil (REM), dengan mempertimbangkan sejumlah variabel kontrol guna meningkatkan validitas hasil analisis.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan, database Capital iq, serta sumber informasi lain yang relevan. Populasi dalam penelitian mencakup seluruh perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017 hingga 2022. Sampel ditentukan menggunakan metode *purposive sampling*, berdasarkan kriteria ketersediaan data untuk seluruh variabel yang diteliti selama periode pengamatan. Variabel dependen dalam penelitian ini terdiri dari dua bentuk manajemen laba, yaitu manajemen laba akrual (AEM) dan manajemen laba riil (REM). AEM diukur dengan menggunakan residual dari *Modified Jones Model* sebagai metode utama.

Berikut merupakan model dari manajemen laba akrual tersebut:

Modified Jones Model (Dechow et al. 1995)

$$\frac{TAC_{it}}{Assets_{it-1}} = \alpha_0 + \alpha_1 \left(\frac{1}{Assets_{it-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta Sales_{it} - \Delta REC}{Assets_{it-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_{it}}{Assets_{it-1}} \right) + \varepsilon_{it}$$

Dimana TAC adalah total akrual, $Assets_{it-1}$ merupakan total aset pada periode $t-1$, $\Delta Sales$ adalah total perubahan penjualan dari tahun sebelumnya, PPE adalah nilai aset tetap, dan ΔREC merupakan total perubahan piutang dari tahun sebelumnya.

Di sisi lain, REM diukur berdasarkan pendekatan Roychowdhury (2006) terhadap 3 faktor individual yang mencakup *abnormal cash flow from operations*, *abnormal production costs*, dan *abnormal discretionary expenses*.

Berikut merupakan cara menghitung ketiga faktor REM tersebut:

$$\frac{CFO_{it}}{Assets_{it-1}} = \beta_0 + \beta_1 \left(\frac{1}{Assets_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{Sales_{it}}{Assets_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{\Delta Sales_{it}}{Assets_{it-1}} \right) + \varepsilon_{it}$$

$$\frac{PROD_{it}}{Assets_{it-1}} = \beta_0 + \beta_1 \left(\frac{1}{Assets_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{Sales_{it}}{Assets_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{\Delta Sales_{it}}{Assets_{it-1}} \right) + \beta_4 \left(\frac{\Delta Sales_{it-1}}{Assets_{it-1}} \right) + \varepsilon_{it}$$

$$\frac{DISEXP_{it}}{Assets_{it-1}} = \beta_0 + \beta_1 \left(\frac{1}{Assets_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{Sales_{it-1}}{Assets_{it-1}} \right) + \varepsilon_{it}$$

Ketiga faktor ini akan digunakan untuk mengukur nilai REM secara agregat dengan berdasarkan pada pendekatan yang diimplementasikan oleh Khalil et al. (2022), yang juga mengikuti studi-studi terdahulu mengenai manajemen laba seperti Cohen et al. (2008).

$$REM = (-1 * RCFO) + RPROD + (-1 * RDISEXP)$$

Variabel independen dalam penelitian ini adalah koneksi politik, yang diukur menggunakan variabel dummy. Perusahaan dikategorikan memiliki koneksi politik apabila terdapat anggota dewan komisaris atau pemegang saham yang memiliki latar belakang politik, seperti mantan anggota parlemen, menteri, pejabat eselon 1, mantan jenderal TNI/Polisi, atau anggota partai politik, dan atau memiliki hubungan dekat dengan orang-orang dengan posisi tersebut, dan diberikan nilai 1. Jika tidak terdapat koneksi politik, maka diberikan nilai 0. Selain itu, digunakan enam variabel kontrol untuk meningkatkan akurasi estimasi model, yaitu *size*, *dividend payout ratio*, *leverage*, *capital intensity*, *cash holding*, *assymetry*, *return on assets* (ROA), dan keberadaan auditor *Big 4*.

Analisis data dilakukan menggunakan regresi subsample yaitu dengan meregresi secara bertahap antara tahun observasi sebelum COVID-19 dan saat COVID-19. Terdapat perbedaan pendekatan metodologis antara penelitian ini dan studi yang dilakukan oleh Khalil et al. (2022), khususnya dalam pemilihan model regresi. Khalil et al. (2022) menggunakan *Heckman two-step model* untuk mengatasi potensi bias seleksi. Sementara itu, penelitian ini menggunakan model *etregress* (*endogenous treatment-regression*) yang didasarkan pada metode *full information maximum likelihood* (FIML). Model *etregress* dirancang untuk mengestimasi parameter regresi linier yang melibatkan variabel perlakuan biner yang bersifat endogen. Pendekatan ini memungkinkan estimasi *average treatment effect* (ATE)

serta *average treatment effect on the treated* (ATET), bahkan ketika variabel hasil (*outcome*) tidak sepenuhnya bersifat independen secara kondisional terhadap variabel perlakuan.

Selain itu, *etregress* menyediakan beberapa opsi estimasi, termasuk estimasi dua tahap yang konsisten dan pendekatan *control-function*, sehingga dapat disesuaikan dengan karakteristik data yang digunakan. Penerapan model ini membutuhkan *exclusion restriction* di dalamnya, dimana persentase jumlah perusahaan terkoneksi politik (Polconperc), tingkat pengangguran regional (Regun), dan jarak HQ ke ibukota (Lnhqdis) digunakan. Pemilihan variabel ini merujuk pada Khalil et al. (2022), yang menekankan pentingnya memasukkan setidaknya satu variabel dalam tahap pertama estimasi yang memengaruhi kemungkinan perusahaan memiliki koneksi politik, namun tidak berkaitan langsung dengan praktik manajemen laba.

Model regresi akhir yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$AEM_{it} \text{ or } (REM_{it}) = \alpha + \beta Pcon_{it} + \gamma X_{it} + \theta(Industry_{it}) + \delta(Year_{it}) + \varepsilon_{it}$$

Populasi dan Sampel

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti laporan tahunan perusahaan, data keuangan dari Capital iq, serta informasi tambahan yang relevan. Data dikumpulkan untuk periode 2017 hingga 2022 guna mencakup kondisi sebelum dan selama pandemi COVID-19. Seluruh data yang digunakan telah melalui proses seleksi untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dengan kebutuhan penelitian. Daftar perolehan sampel penelitian dapat dijelaskan dalam **Tabel 1**.

TABEL 1
Pemilihan Sampel

	Perusahaan	Perusahaan-Tahun
Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX)	728	4.368
(Tidak termasuk perusahaan di sektor keuangan dan utilitas)		
Pengecualian:		
Perusahaan dengan data yang tidak lengkap/hilang	382	2.413
Perusahaan dengan ekuitas negatif	14	40
Sampel Final	343	1.915

HASIL DAN DISKUSI

Analisis Sampel Penuh – Pengaruh Koneksi Politik terhadap Manajemen Laba

Analisis regresi pada sampel penuh memberikan gambaran awal dan umum mengenai hubungan antara koneksi politik dan manajemen laba secara umum. Penelitian ini menguji pengaruh koneksi politik terhadap praktik manajemen laba akrual (AEM) dan manajemen laba riil (REM), dengan menggunakan model yang telah digunakan dalam studi manajemen laba terdahulu. Untuk AEM, penelitian ini menggunakan *Modified Jones Model* milik Dechow (1995). Sementara itu, untuk REM, penelitian ini mengadopsi model yang dikembangkan oleh Roychowdhury (2006), yang juga digunakan oleh Khalil et al. (2022) dalam penelitian mereka.

TABEL 2
Hasil Regresi Full Sampel

Full Sample	Full Sample
AEM	REM

	Coeff.	SE	Coeff.	SE
Polcon	0.0758***	0.0236	0.0786	0.0518
Size	-0.0018	0.0015	0.0195***	0.0040
Big4	-0.0178***	0.0045	-0.0111	0.0132
Asymmetry	-0.0848	0.1602	0.2160	0.4869
Divpayout	0.0049	0.0041	0.0078	0.0111
Capital_Int	-0.0218**	0.0088	-0.1530***	0.0235
Leverage	0.0081	0.0128	0.0726**	0.0335
Casholding	-0.1314***	0.0220	-0.4113***	0.0640
ROA	0.3517***	0.0323	-0.9101***	0.1025
Industry FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	1,809		1,809	
Wald Test	8.83***		3.63*	
Wald Chi2(22)	177.15***		349.18***	

Berdasarkan hasil regresi, ditemukan bukti bahwa keberadaan koneksi politik (Polcon) secara efektif meningkatkan praktik AEM, bertentangan dengan Khalil et al. (2022). Analisis terhadap variabel kontrol menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar (*Size*) cenderung meningkatkan praktik REM. Hasil regresi juga menunjukkan bahwa keberadaan auditor berkualitas (*Big4*) cenderung efektif untuk menekan AEM meskipun tidak pada REM. Di sisi lain, asimetri informasi (*Assymetry*) dan keputusan perusahaan untuk membayar dividend (*Divpayout*) bersama-sama tidak menunjukkan hubungan signifikan dengan AEM dan REM.

Selain itu, hasil regresi juga mengindikasikan bahwa perusahaan dengan intensitas aset tetap dan kepemilikan kas yang lebih besar memiliki kualitas laba baik. Penelitian ini juga memberikan bukti bahwa perusahaan dengan kesulitan keuangan (*Leverage*) lebih terlibat secara aktif dalam aktivitas REM dimana hal ini berkebalikan dengan perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang lebih baik (ROA) yang cenderung mengurangi aktivitas REM dan lebih memilih untuk menggunakan strategi manajemen laba melalui fleksibilitas akuntansi (AEM).

Secara keseluruhan, hasil pada sampel penuh ini memberikan indikasi awal bahwa hubungan antara koneksi politik dan manajemen laba bersifat kompleks. Namun, perlu ditekankan bahwa penggunaan sampel penuh berisiko mengaburkan efek temporal yang dapat terjadi akibat krisis seperti pandemi COVID-19. Oleh karena itu, untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana peran koneksi politik berubah dalam kondisi krisis, analisis subsampel sebelum dan selama COVID-19 perlu dilakukan secara terpisah. Analisis yang lebih mendetail terkait hubungan antara koneksi politik dan manajemen laba akan dijelaskan pada hasil analisis subsampel dibawah.

Analisis Subsampel – Pengaruh Koneksi Politik terhadap Manajemen Laba

Ditemukan bukti bahwa koneksi politik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap AEM dan REM pada periode sebelum COVID-19. Berikut merupakan hasil regresi terhadap analisis subsample yang telah dilakukan:

TABEL 3
Hasil Regresi Sub-Sampel

	Sebelum COVID-19				Saat COVID-19			
	AEM		REM		AEM		REM	
	Coeff.	SE	Coeff.	SE	Coeff.	SE	Coeff.	SE
Polcon	-0.0275	0.0972	-0.0300	0.1058	0.1123***	0.0152	0.1859**	0.0729
Size	0.0036*	0.0020	0.0227***	0.0058	-0.0069***	0.0022	0.0157***	0.0056
Big4	-0.0159**	0.0068	0.0077	0.0196	-0.0163**	0.0065	-0.0278	0.0180
Asymmetry	-0.0469	0.1922	0.5709	0.6200	0.1969	0.2995	-0.5704	0.7573
Divpayout	0.0045	0.0057	-0.0035	0.0161	0.0061	0.0058	0.0184	0.0149
Capital_In	-0.0258**	0.0122	-0.0966***	0.0349	-0.0183	0.0128	-0.2062***	0.0318
Leverage	0.0343*	0.0179	0.0675	0.0516	-0.0085	0.0185	0.0846*	0.0434
Casholding	-0.1264***	0.0337	-0.3954***	0.1119	-0.1343***	0.0299	-0.4327***	0.0778
ROA	0.3808***	0.0458	-1.1615***	0.1646	0.3599***	0.0445	-0.7094***	0.1245
Industry FE	Yes		Yes		Yes		Yes	
Year FE	Yes		Yes		Yes		Yes	
Observations	897		897		912		912	
Wald Test	0.08		0.03		40.22***		7.16***	
Wald								
Chi2(19)	107.06***		176.51***		139.70***		216.95***	

Seperti yang ditunjukkan dalam hasil regresi subsampel diatas, ditemukan bukti bahwa koneksi politik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap AEM dan REM pada periode sebelum COVID-19. Hasil ini tampaknya tidak sejalan dengan penelitian (Khalil et al, 2022). Ketidadaan pengaruh yang ditunjukkan dalam penelitian ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor dimana salah satunya adalah periode observasi yang lebih terbatas jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan rentang waktu lebih panjang. Dengan kata lain, penting untuk diingat bahwa antara penelitian ini dan Khalil et al. (2022) mungkin terdapat perbedaan dalam periode observasi. Penelitian ini membagi periode observasi menjadi dua fase, yaitu sebelum dan selama pandemi COVID-19, sementara Khalil et al. (2022) menggunakan periode observasi yang lebih panjang, yang memungkinkan mereka untuk menangkap pola yang lebih stabil dalam hubungan antara koneksi politik dan manajemen laba akrual. Dengan periode yang lebih terbatas, penelitian ini mungkin tidak cukup sensitif untuk mendeteksi pengaruh koneksi politik terhadap AEM khususnya pada periode sebelum COVID-19 ini.

Selain koneksi politik, variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang umumnya konsisten dengan temuan penelitian terdahulu. Ukuran perusahaan (*size*) berhubungan positif dan signifikan terhadap AEM dan REM. Temuan ini sejalan dengan prediksi *political cost hypothesis* yang dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (1990), yang menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki insentif untuk melakukan manajemen laba guna meminimalkan tekanan politik. Ukuran perusahaan dipandang sebagai proksi atas perhatian politik yang mungkin diterima perusahaan, dan dengan ekspektasi publik yang lebih tinggi, perusahaan besar cenderung lebih berhati-hati dan melakukan manajemen laba sebagai bentuk perlindungan dari regulasi atau intervensi pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, perusahaan besar tetap memperhatikan eksposur politik dan memilih untuk menggunakan strategi riil guna mengelola laba secara strategis yang bisa jadi dikarenakan praktik REM cenderung lebih sulit terdeteksi.

Di sisi lain, *leverage* juga menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap AEM namun pengaruh signifikan tersebut tidak ditemukan pada REM yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan kondisi keuangan yang sedang sulit cenderung melakukan manajemen laba. Selanjutnya, penelitian ini tidak menemukan bukti signifikan terkait dengan pengaruh keputusan perusahaan untuk membagikan dividen dan asimetri informasi terhadap manajemen laba baik akrual maupun riil. Selain itu, *capital intensity* menunjukkan hubungan negatif signifikan terhadap kedua jenis manajemen laba, konsisten dengan temuan Perotti dan Wagenhofer (2014).

Sejalan dengan Khalil et al (2022), perusahaan dengan kepemilikan kas yang lebih besar menunjukkan tingkat manajemen laba akrual dan riil yang lebih rendah. Hal ini mungkin dapat disebabkan karena perusahaan dengan karakteristik tersebut memiliki cadangan dana yang cukup, perusahaan-perusahaan ini tidak mengalami tekanan untuk terlihat lebih menguntungkan demi mendapatkan akses pembiayaan eksternal, sehingga insentif manajemen laba menjadi rendah.

Menariknya, penelitian ini menemukan bukti bahwa perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang lebih baik (diukur dengan ROA) memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap AEM namun negatif signifikan terhadap REM. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan kriteria tersebut cenderung mengurangi praktik manajemen laba berbasis riil yang mungkin disebabkan praktik tersebut cenderung memiliki efek yang lebih destruktif. Efek destruktif ini dijelaskan oleh Roychowdury (2006) yang menyatakan bahwa praktik manajemen laba riil dapat menurunkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, dengan kata lain, perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang lebih baik akan lebih memilih fleksibilitas akuntansi untuk melakukan manajemen laba dibandingkan harus mengorbankan kinerja jangka panjang mereka.

Terakhir, penelitian menemukan bukti bahwa kualitas audit, yang diwakili oleh auditor Big 4, menunjukkan pengaruh signifikan terhadap AEM namun tidak terhadap REM. Salah satu penjelasan terkait temuan ini adalah bahwa manajemen laba berbasis akrual cenderung lebih gampang terdeteksi oleh auditor dibandingkan manajemen laba yang berbasis keputusan riil seperti yang dijelaskan oleh Roychowdury (2006).

Selama periode pandemi COVID-19, ditemukan bahwa koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap praktik manajemen laba riil (REM) dan manajemen laba akrual (AEM). Artinya, selama pandemi COVID-19, keberadaan koneksi politik menjadi penting dan terlihat dalam kaitannya dengan peningkatan intensitas praktik manajemen. Dengan kata lain juga, pengaruh koneksi politik terhadap manajemen laba merupakan hal yang bersifat kontekstual, artinya

pengaruh tersebut sangat dipengaruhi pada kondisi yang sedang dihadapi oleh perusahaan yaitu berpengaruh signifikan dalam periode krisis seperti pandemi namun tidak pada periode non krisis.

Secara teoritis, hasil ini bertentangan dengan temuan Khalil et al. (2022) yang menyimpulkan bahwa keberadaan koneksi politik justru berperan sebagai tata kelola yang efisien untuk menekan praktik manajemen laba. Argumen terkait hal ini adalah penting untuk dicatat bahwa efektivitas tata kelola tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga oleh kekuatan perlindungan investor dari suatu negara. Dalam hal ini, konteks Indonesia memiliki kemiripan dengan Prancis, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Hamdi (2024). Hamdi menemukan bahwa koneksi politik di negara dengan perlindungan investor yang lemah dapat melemahkan mekanisme pengawasan dan menyebabkan keberadaan koneksi politik tetap dapat mengintervensi keputusan terkait manajemen laba dan menyebabkan kualitas laba menjadi lebih rendah.

Selain itu, hasil penelitian ini juga perlu dilihat dalam konteks periode krisis COVID-19. Ketika dilakukan analisis subsampel untuk periode sebelum pandemi, koneksi politik tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap AEM maupun REM. Namun selama pandemi, pengaruh tersebut menjadi signifikan dan positif. Temuan ini mengindikasikan adanya perubahan perilaku manajerial dalam merespons tekanan krisis. Pandangan ini seolah bertentangan dengan argumen Garfatta et al. (2023) dan Ahmad-Zaluki et al. (2011) yang menyatakan bahwa dalam situasi krisis, manajemen laba cenderung berkurang. Menurut mereka, pasar biasanya lebih toleran terhadap kinerja keuangan yang menurun selama masa krisis, sehingga tekanan untuk "memoles" kinerja juga berkurang. Bagi perusahaan yang sudah memiliki koneksi politik, semestinya tekanan tersebut semakin kecil karena posisi mereka sudah relatif aman. Namun, hasil empiris penelitian ini menunjukkan sebaliknya. Tetapi, mungkin secara umum pasar menjadi lebih toleran dikarenakan kondisi ini, namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa perusahaan tetap dapat terdorong untuk melakukan manajemen laba.

Argumen peneliti terkait hal ini adalah mengikuti Lassoed dan Khanchel (2021), mereka menjelaskan bahwa perusahaan dapat terdorong untuk tetap melakukan manajemen laba secara *upward* ke tingkat yang "dapat diterima" guna menghindari kesan bahwa kondisi mereka jauh lebih buruk dibandingkan pesaingnya. Dalam situasi krisis, pelaporan rugi yang terlalu besar dapat merusak kepercayaan investor dan memicu kejatuhan harga saham. Oleh karena itu, perusahaan – terutama yang memiliki koneksi politik dan merasa "kebal" terhadap risiko regulatif – mungkin terdorong untuk tetap merekayasa laporan keuangan guna menjaga persepsi pasar dan menunjukkan bahwa mereka masih dalam posisi kompetitif. Dengan demikian, hasil penelitian ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan karakteristik institusional dan kondisi eksternal seperti krisis dalam memahami hubungan antara koneksi politik dan manajemen laba. Meskipun secara struktur Indonesia tampak memiliki sistem pengawasan yang kuat, praktik di lapangan menunjukkan bahwa koneksi politik tetap dapat melemahkan akuntabilitas dan meningkatkan distorsi dalam pelaporan keuangan, terutama pada masa-masa krisis.

Selanjutnya, temuan pada variabel kontrol juga menunjukkan adanya pergeseran antara periode sebelum dan pada saat pandemi COVID-19. Ukuran perusahaan (*size*), misalnya, yang tetap menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kedua manajemen laba meskipun dengan hubungan terbalik yaitu positif terhadap REM dan negatif terhadap AEM. Selain itu, pergeseran ini juga terlihat pada variabel *leverage*, di mana pada periode sebelum pandemi, perusahaan yang menghadapi tekanan keuangan cenderung memiliki insentif untuk melakukan manajemen laba melalui akrual. Namun, pada periode pandemi, pola ini bergeser, dan perusahaan lebih cenderung menggunakan manajemen laba berbasis aktivitas riil (REM). Hal ini mungkin dikarenakan aktivitas manajemen laba riil yang lebih sulit terdeteksi.

Sejalan dengan hasil sebelumnya, kualitas audit, yang diukur melalui keberadaan auditor *Big 4*, juga menunjukkan peningkatan peran selama masa pandemi yang dapat dilihat dari nilai koefisien yang semakin besar. Hasil ini mendukung temuan Reguera-Alvarado et al. (2018), yang menegaskan bahwa dalam masa krisis, auditor *Big 4* berperan penting dalam mengurangi praktik manajemen laba pada periode krisis.

Konsistensi pengaruh juga dapat terlihat pada hasil temuan *cash holding* yang tetap menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap kedua jenis manajemen laba, yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan kepemilikan kas yang lebih besar tetap tidak terdorong untuk melakukan manajemen laba meski pada situasi krisis. Variabel *capital intensity* juga tetap konsisten menunjukkan pengaruh negatif signifikan REM meskipun pengaruh terhadap AEM menjadi hilang. Selain itu, *dividend payout ratio* dan *asymmetry* juga secara konsisten tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap AEM dan REM pada kedua periode yang diuji.

Analisis Tambahan – Peran Tekanan Keuangan terhadap Hubungan Koneksi dan Manajemen Laba

Sebagai uji tambahan, penelitian ini menginvestigasi apakah hubungan antara koneksi politik dan manajemen laba selama masa pandemi COVID-19 hanya terjadi pada perusahaan yang mengalami tekanan keuangan (*financial distress*) –ditandai dengan “FD” –, atau juga ditemukan pada perusahaan dengan kondisi keuangan yang relatif sehat. Hasil regresi dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Hasil Regresi Sub Sampel Financial Distress Saat Pandemi

	FD = 1				FD = 0			
	AEM		REM		AEM		REM	
	Coeff.	SE	Coeff.	SE	Coeff.	SE	Coeff.	SE
Polcon	0.1239***	0.0189	0.2508***	0.0793	0.1050***	0.0274	0.1033*	0.0603
Size	-0.0084***	0.0030	0.0095	0.0069	-0.0052	0.0032	0.0179**	0.0090
Big4	-0.0183**	0.0087	-0.0521	0.0251	-0.0142	0.0093	0.0241	0.0252
Asymmetry	-0.2552	0.4239	-1.0549	1.1182	1.1204***	0.4294	0.6855	0.9664
Divpayout	0.0086	0.0082	0.0348	0.0271	0.0023	0.0083	0.0021	0.0148
Capital_In	-0.0030**	0.0187	-0.1888***	0.0421	-0.0397**	0.0187	-0.1815***	0.0495
Leverage	0.0015*	0.0255	0.0974*	0.0586	-0.0203	0.0356	0.1334	0.0880
Casholding	-0.1142**	0.0550	-0.2501*	0.1347	-0.1368***	0.0354	-0.4379***	0.0916
ROA	0.4589***	0.0579	-0.2402*	0.1365	0.2003***	0.0673	-1.4730***	0.1972
Industry FE	Yes		Yes		Yes		Yes	
Year FE	Yes		Yes		Yes		Yes	
Observations	455		455		457		457	
Wald Test	28.32***		8.73***		10.71***		5.66**	
Wald Chi2(19)	146.06***		73.31***		57.62***		230.70***	

Pengukuran *financial distress* dalam penelitian ini didasarkan pada skor Altman Z yang dimodifikasi oleh Altman et al. (1998), yang dinilai lebih sesuai dengan konteks negara berkembang seperti Indonesia. Skor ini dihitung dengan rumus:

$$Z'' = 3.25 + 6.56X_1 + 3.26X_2 + 6.72X_3 + 1.05X_4$$

dengan:

X_1 = Working capital / Total assets

X_2 = Retained earnings / Total assets

X_3 = EBIT / Total assets

X_4 = Book value equity / Book value liabilities

Semakin tinggi nilai Z-Score, semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini, dibuat variabel *dummy financial distress* (FD) yang bernilai 1 jika nilai *Altman Z-Score* suatu perusahaan berada di bawah nilai median sampel, dan 0 jika di atas median. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh koneksi politik terhadap praktik manajemen laba, baik berbasis akrual (AEM) maupun aktivitas riil (REM), tetap signifikan dan positif pada kedua kelompok perusahaan, baik yang termasuk dalam kategori *distress* (FD = 1) maupun *non-distress* (FD = 0). Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik manajemen laba oleh perusahaan yang memiliki koneksi politik selama masa krisis tidak terbatas pada perusahaan yang berada dalam tekanan keuangan. Dengan kata lain, koneksi politik cenderung memberikan insentif atau ruang bagi perusahaan untuk melakukan manajemen laba secara lebih luas, tidak hanya sebagai respon atas kesulitan keuangan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan dan stabilisasi reputasi di tengah krisis.

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi apakah koneksi politik memiliki hubungan terhadap praktik manajemen laba, baik berbasis akrual maupun riil, serta apakah hubungan ini mengalami perubahan dalam konteks krisis, khususnya pandemi COVID-19. Hasil estimasi dari sampel perusahaan publik Indonesia periode 2017–2022 menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba akrual. Secara lengkap, setelah dilakukan analisis sub sampel untuk kedua periode yang diteliti, ditemukan bahwa pengaruh koneksi politik terhadap manajemen laba tidak terlihat pada situasi normal namun pengaruhnya menjadi muncul pada situasi pandemi.

Temuan ini memberikan kontribusi pada literatur yang membahas hubungan antara koneksi politik dan kualitas pelaporan keuangan di negara berkembang, dengan tata kelola perusahaan dan perlindungan hukum yang terbatas bagi pemegang saham minoritas. Hasil penelitian ini juga menentang argumen bahwa keberadaan aktor politik dalam dewan perusahaan dapat membatasi perilaku oportunistik manajer. Hasil penelitian ini juga memberikan arti bahwa keberadaan koneksi politik dan pengaruhnya merupakan hal yang bersifat kontekstual. Dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19, koneksi politik berperan lebih signifikan dalam meningkatkan praktik manajemen laba demi perusahaannya tetap terlihat kompetitif meskipun terdapat toleransi terhadap kinerja buruk pada periode tersebut.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa koneksi politik cenderung dimanfaatkan perusahaan untuk meningkatkan praktik manajemen laba saat pandemi, mencerminkan adanya insentif oportunistik di tengah ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, investor dan auditor perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap perusahaan berafiliasi politik dalam situasi krisis, sementara regulator disarankan untuk memperketat pengawasan dan transparansi hubungan politik guna meminimalkan potensi penyalahgunaan informasi keuangan. Sementara itu, bagi perusahaan, temuan ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola untuk menjaga kualitas pelaporan, terlepas dari adanya koneksi politik.

Terdapat sejumlah keterbatasan dalam penelitian ini yang perlu dipertimbangkan saat menginterpretasikan hasil yang diperoleh. Pertama, pengukuran manajemen laba, baik akrual maupun riil, didasarkan pada model estimasi yang berisiko mengalami kesalahan dalam mendeteksi manipulasi sebenarnya, sehingga hasil yang diperoleh dapat

terpengaruh oleh keterbatasan model tersebut. Kedua, penelitian ini tidak membedakan jenis koneksi politik secara spesifik, sehingga tidak dapat menangkap variasi pengaruh berdasarkan tipe atau jabatan politik yang dimiliki oleh pihak dalam perusahaan. Ketiga, Observasi dalam penelitian ini terbatas pada perusahaan terbuka di Indonesia selama periode 2017–2022, sehingga implikasi dari hasil penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya relevan jika diterapkan pada konteks geografis atau waktu yang berbeda. Terakhir, potensi bias seleksi sampel tidak sepenuhnya dapat dihindari, mengingat terdapat kemungkinan bahwa perusahaan dengan karakteristik tertentu yang tidak terobservasi lebih cenderung memiliki koneksi politik atau melakukan manajemen laba.

REFERENSI

- Ahmed, A. S., Duellman, S., & Grady, M. (2022). Political connections and the trade-off between real and accrual-based earnings management. *Contemporary Accounting Research*, 39(4), 2235–2969.
- Ali, H., Amin, H. M. G., Mostafa, D., & Mohamed, E. K. A. (2022). Earnings management and investor protection during the COVID-19 pandemic: Evidence from G-12 countries. *Managerial Auditing Journal*, 37(2), 775–797.
- Ball, R., Robbin, A., & Wu, J. S. (2003). Incentives versus standards: Properties of accounting income in four East Asian countries. *Journal of Accounting and Economics*, 36(1–3), 235–270.
- Claessens, S., Djankov, S., & Lang, L. H. P. (2000). The separation of ownership and control in East Asian corporations. *Journal of Financial Economics*, 58(1–2), 81–112.
- Cohen, D. A., Dey, A., & Lys, T. Z. (2008). Real and accrual-based earnings management in the pre- and post-Sarbanes–Oxley periods. *The Accounting Review*, 83(3), 757–787.
- Dechow, P., Sloan, R., & Sweeney, A. (1995). Detecting earnings management. *The Accounting Review*, 70(2), 193–225.
- Duchin, R., & Sosyura, D. (2012). The politics of government investment. *Journal of Financial Economics*, 106(1), 24–48.
- Faccio, M., Masuli, R. W., & McConnell, J. J. (2006). Political connections and corporate bailouts. *The Journal of Finance*, 61(6), 2597–2635.
- Garfatta, R., Hamza, M., & Zorgati, I. (2023). COVID-19 outbreak and earnings management practice: Case of Tunisia. *Asian Journal of Accounting*, 8(3), 307–318.
- Gul, F. A., Chen, C. J. P., & Tsui, J. S. L. (2009). Discretionary accounting accruals, managers' incentives, and audit fees. *Contemporary Accounting Research*, 20(3), 441–464.
- Hamdi, B. (2024). Political connections of independent directors and earnings quality: The case of French firms. *Economics Letters*, 244, Article 111996.
- Harymawan, I., & Nowland, J. (2016). Political connections and earnings quality: How do connected firms respond to changes in political stability and government effectiveness? *International Journal of Accounting & Information Management*, 24(4), 339–356.
- Hashmi, M. A., Brahmana, R. K., & Lau, E. (2018). Political connections, family firms and earnings quality. *Management Research Review*, 41(4), 414–432.
- Jones, J. J. (1991). Earnings management during import relief investigations. *Journal of Accounting Research*, 29(2), 193–228.
- Joni, J., Ahmed, K., & Hamilton, J. (2020). Politically connected boards, family and business group affiliations, and cost of capital: Evidence from Indonesia. *The British Accounting Review*, 52(3), 100877.
- Khalil, M., Harianto, S., & Guney, Y. (2022). Do political connections reduce earnings management? *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 59(1), 273–310.
- Li, M., Liu, D., Peng, H., & Zhang, L. (2022). Political connection and its impact on equity market. *Research in International Business and Finance*, 60, 101593.
- Lisboa, I., & Kacharava, A. (2018). Does financial crisis impact earnings management: Evidence from Portuguese and UK. *European Journal of Applied Business Management*, 4(1), 80–100.
- Liu, Q., Tang, J., & Tian, G. G. (2013). Does political capital create value in the IPO market? Evidence from China. *Journal of Corporate Finance*, 23, 395–413.

- Perotti, P., & Wagenhofer, A. (2014). Earnings quality measures and earnings management. *Journal of Accounting and Public Policy*, 33(6), 471–490.
- PricewaterhouseCoopers (PwC). (2014). Indonesia report: Family business survey 2014. PwC Indonesia.
- Purkayastha, S., Veliyath, R., & George, R. (2022). Type I and type II agency conflicts in family firms: An empirical investigation. *Journal of Business Research*, 153, 285–299.
- Reguera-Alvarado, N., Fuentes, D. P., & Laffarga, J. (2019). Do auditors mitigate earnings management during economic crisis? *Spanish Accounting Review*, 22, 6–20.
- Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. *Journal of Accounting and Economics*, 42(3), 335–370.
- Supatmi. (2022). The effect of political connections on firms' performance: The moderating role of leverage. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(2), 281–294.
- Zang, A. Y. (2012). Evidence on the trade-off between real activities manipulation and accrual-based earnings management. *The Accounting Review*, 87(2), 675–703.